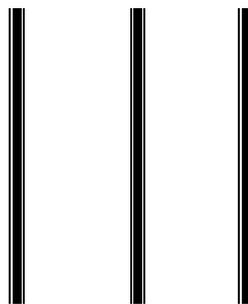


**LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP) TAHUN 2018**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



**Alamat Kantor:**

Jl. Letkol Pol. Toegino No. Telp./Fax. (0742) 21021 Email:p3ap2kbbkabtanjabbarat@yahoo.com

**KUALA TUNGKAL**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama satu tahun anggaran Tahun 2018, telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2018 dalam wujud program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan.

Pelaporan kinerja adalah salah satu komponen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 adalah untuk memberikan informasi atas pencapaian serta pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, berdayaguna berhasilguna dan bertanggungjawab serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program/kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran strategis.

Kami menyadari laporan ini masih banyak kekurangan-kekurangan dalam menyusun laporan ini dan berharap adanya masukan dari pihak manapun untuk menyumbangkan buah pikiran demi penyempurnaan laporan dimaksud, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Kuala Tungkal,        Februari 2018

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. H. AHMAD PALLOGE

Pembina Utama Muda  
NIP. 19600305 198403 1 013

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	1
C. Gambaran Organisasi .....	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	8
A. Perencanaan Strategis .....	8
B. Perjanjian Kinerja .....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	12
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2018 .....	12
B. Realisasi Anggaran Tahun 2018 .....	28
BAB IV PENUTUP .....	30

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil, Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkewajiban membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah yang berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Good Government). Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai suatu instansi pemerintah yang baik berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yaitu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan kinerja berisi ikhtisar pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen rencana kerja tahunan.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari disusunnya laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018, sebagai salah satu bagian SAKIP, yaitu sebagai media informasi pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengukur tingkat keberhasilan atas pencapaian sasaran strategis atas pelaksanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Barat dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas serta program dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan LkjIP Tahun 2018 adalah untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai sebagaimana perencanaan strategis dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja
3. Bahan evaluasi dan pengambilan keputusan untuk peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan serta pemenuhan hak anak, peningkatan pengendalian penduduk dan pelayanan akseptor KB.

## **C. Gambaran Organisasi**

### **1. Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

### **2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pasal 5 ayat (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Typologi "Tipe A" terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) bidang.

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Subbagian yaitu :
  - Subbag Umum dan Kepegawaian
  - Subbag Keuangan
  - Subbag Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu :
  - Seksi Perlindungan Perempuan;
  - Seksi PengarusUtamaan Gender; dan
  - Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
- d. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu :
  - Seksi Perlindungan Anak;
  - Seksi Partisipasi, Potensi dan Lingkungan Anak;
  - Seksi Tumbuh Kembang Anak;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu :
  - Seksi Advokasi dan Pergerakan
  - Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
  - Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
- f. Bidang KB dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu :
  - Seksi Jaminan Ber-KB
  - Seksi Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga
  - Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

### **3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi**

Aspek-aspek strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, permasalahan dan arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, dan isu utama Kementerian/Lembaga terkait tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain :

- a. Belum optimalnya perlindungan, kelembagaan, dan peran perempuan dalam pembangunan
- b. Belum optimalnya perlindungan, sarana dan pemenuhan hak anak di Kab/Kota
- c. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah desahan kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan
- d. Belum optimalnya penguatan ekonomi masyarakat dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan
- e. Tingginya laju pertumbuhan penduduk

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal
- b. Terbatasnya SDM yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- c. Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat, LSM dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih rendah.
- d. Masih rendahnya IPG dan IDG
- e. Belum optimalnya kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
- f. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- g. Belum optimalnya pelaksanaan Kabupaten Layak anak
- h. Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga legislative
- i. Tingginya laju pertumbuhan penduduk
- J. Masih rendahnya rasio akseptor KB MKJP
- j. Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi(Unmetneed)
- k. Masih rendahnya rasio Petugas Lapangan KB /PKB di setiap Desa/Kelurahan
- l. Tingginya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1
- m. Masih rendahnya rasio Petugas Lapangan KB /PKB di setiap Desa/Kelurahan
- n. Tingginya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1
- o. Belum optimalnya Pusat Informasi dan Konseling (PIK)

#### **4. Landasan Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung jawab keuangan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 205 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;

- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Nomor 104, tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421;
- e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 591 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844).
- f. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
- l. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Permenpan dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- p. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

## **5. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya aparatur berdasarkan data/keadaan bulan Desember 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berjumlah 33 orang ASN, terdiri dari laki-laki 14 orang dan perempuan 18 orang. Kemudian PLKB ASN berjumlah 7 orang terdiri dari laki-laki 3 orang dan perempuan 4 orang, sehingga ASN berjumlah 40 orang. Tenaga Kerja Kontrak(TKK) sebanyak 12 Orang terdiri dari laki-laki 7 orang dan perempuan 5 orang serta motivator KB 14 Orang. Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut terdiri dari Eselon II.b; 1 orang, Eselon III.a; 1 orang, Eselon dan Jabatan Fungsional Umum 11 orang. Di bawah ini dapat dilihat data kepegawaian berdasarkan Eselon/PLKB/TKK dan pendidikan.

Tabel 1.1 Data Kepegawaian Tahun 2018

No	ESELON/UPTD/PLKB /TKK	Jumlah	Jenis Kelamin		Pendidikan						
			L	P	S-3	S-2	S-1	D-3	SLTA	SLTP	SD
1.	Eselon II.b	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
2.	Eselon III.a	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
3.	Eselon III.b	4	3	1	-	-	4	-	-	-	-
4.	Eselon IV.a	15	4	11	-	1	13	-	1	-	-
6.	Jabatan Fungsional Umum	12	5	7					12		
7.	PLKB(Jabatan Fungsional) dan Pegawai Pusat	7	4	3	-	-	1	-	6	-	-
8	TKK	12	7	5	-	-	-	1	11	-	-
	Jumlah	52	23	29	-	1	19	1	28	-	-

## 6. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagai berikut :

1. Gedung Kantor 1(satu) unit
2. Aula tempat pertemuan / rapat
3. Kendaraan Dinas sebagai operasional aparatur dan pelayanan di lapangan
  - Roda Empat 4(empat) unit terdiri dari
  - Roda empat Operasioanal Kepala Dinas
  - Roda empat Operasioanal Kantor

- Roda empat Mupen KB
  - Roda empat Bus Engkel untuk jemput antar peserta KB
  - Roda Dua 16 unit
4. Perlengkapan kantor seperti Meja kerja dan kursi kerja, lemari arsip, filing cabinet, Kursi Tamu, Papan Pengumuman dan Papan Struktur Organisasi
  5. Peralatan Kantor seperti Komputer, Printer, Lap Top, Faximile, Telepon, , AC, UPS, Stavol Listrik dan WI-Fi.
  - 6 Gedung Balai Penyuluhan KB 14 unit di Kecamatan

## **7. Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Tahun 2018, yang disusun dari Bab I sampai dengan Bab IV dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I. Pendahuluan**

Berisi pembahasan Latar belakang, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Maksud dan Tujuan Penyusunan Lkjip dan Sumber Daya Manusia serta Sistematika Penyajian.

### **BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Menjelaskan secara ringkas penetapan Indikator Kinerja Utama, Sasaran Strategis Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat

### **BAB III. Akuntabilitas Kinerja**

Menjelaskan analisis dan evaluasi pencapaian Indikator Kinerja Utama, Pencapaian Sasaran Strategis dan Akuntabilitas Keuangan.

### **BAB IV. Penutup**

Memuat tentang kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan perencanaan yang bersifat jangka menengah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra adalah merupakan dokumen turunan dari perencanaan jangka menengah daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021 telah tertuang tujuan, sasaran, kebijakan dan program sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :

##### **1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5(lima) tahunan. Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pembangunan yang responsive gender
- b. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak
- c. Meningkatkan kesertaan ber-KB dan kesehatan reproduksi
- d. Mewujudkan ketahanan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi keluarga

Sejalan dengan tujuan tersebut di atas, makasasaran yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pembangunan yang responsive gender
- b. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak
- c. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk, meningkatnya kesertaan ber-KB dan kesehatan Reproduksi
- d. Menurunnya jumlah Pra Keluarga Sejahtera (Pra KS).

##### **2. Kebijakan dan program**

Guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah membuat rencana dan melaksanakan 4 (empat) program utama pada Tahun Anggaran 2018 yang meliputi:

- a. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
- b. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- c. Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
- d. Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Adapun kegiatan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut adalah :

- a. Program Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan  
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
  - 1) Pelatihan bagi SDM pelayanan dan pendamping korban KDRT dan fasilitasi pengembangan Anak(P2TP2A)
  - 2) Sosialisasi dan advokasi kebijakan PUG dan bimbingan manajemen usaha ekonomi keluarga.
- b. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;  
Kegiatan yang dilaksanakan adalah
  - 1) Peningkatan kapasitas DWP Kabupaten Tanjung Jabung Barat
  - 2) Peningkatan kapasitas GOW Kabupaten Tanjung Jabung Barat
  - 3) Penguatan Pengarusutamaan gender dan Data Terpilah
- c. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
  - 1) Pembinaan dan pengembangan tumbuh kembang anak
  - 2) Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA)
  - 3) Pertemuan Forum Anak Daerah
  - 4) Sosialisasi Pengembangan Puskesmas Ramah Anak
  - 5) Sosialisasi Peraturan Daerah tentang perlindungan perempuan dan anak
- d. Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;  
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
  - 1) Peningkatan pelayanan dan pembinaan keluarga berencana
  - 2) Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
  - 3) Pertemuan program Keluarga Berencana dan pelayanan KB bagi keluarga miskin
  - 4) Sosialisasi pendidikan kependudukan melalui jalur formal sekolah sika kependudukan
  - 5) Pertemuan Kader kelompok bina keluarga di Kecamatan
  - 6) Orientasi pendidikan kependudukan bagi kader di kampung KB
  - 7) Dukungan media KIE dan menjemaen BOKB
  - 8) Operasional Integritas program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB
  - 9) Operasional KIE oleh PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu
  - 10) Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
  - 11) Operasional Balai Penyuluhan KB

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sedangkan Perjanjian kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi, misi daerah. Selain itu juga di tingkat perangkat daerah dibuat perjanjian kinerja secara berjenjang, mulai dari Perjanjian Kinerja antara Sekretaris/Kepala Bidang dengan Kepala Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja antara Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi dengan Sekretaris/Kepala Bidang.

Perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meliputi 6 sasaran strategis dengan 14 indikator kinerja utama, dengan besaran target sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO.	SASARAN KINERJA	IKU OPD	Target
1.	Meningkatnya pembangunan yang responsive gender	Indek Pembangunan Gender (IPG)	84,81
2.	Meningkatnya kualitas keluarga dan penanganan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	6%
3	Meningkatnya peran serta dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, dan ekonomi	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	60,97
		Persentase keterlibatan perempuan di lembaga legislatif	30%
4	Meningkatnya Implementasi Kabupaten Layak Anak dan kualitas perlindungan anak	Status capaian Kabupaten Layak Anak	Skor 300
		Rasio kekerasan terhadap anak	6
5	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk dan keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,29%
		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,59%
		Persentase pemakaian kontrasepsi (Contraception Prevalence Rate (CPR))	78,01%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	27,05%
		Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	81,00%
6	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-19 tahun)	19,85%
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur	100%
7	Meningkatnya disiplin, kapasitas sumber daya aparatur dan sistem pelaporan kinerja dan keuangan.	Persentase peningkatan disiplin kapasitas sumber daya aparatur dan sistem manajemen pelaporan kinerja dan keuangan	100%

Penentuan besaran target yang akan dicapai ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 yang merupakan tolok ukur meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemenuhan hak anak serta Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berkaitan dengan dukungan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjab Barat Tahun 2018 anggaran bersumber dari APBD sebesar Rp. 2.513.978.795,- DAK Rp. 3.378.791.625,- maka total anggaran belanja langsung Tahun 2018 adalah sebesar Rp.5.892.770.420,- Alokasi DAK adalah untuk mendukung pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Adapun rincian anggaran belanja langsung yang dilaksanakan pada tiap program dapat diuraikan sebagai berikut :

<b>Program Utama</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	138.492.048,-
2. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	463.222.950,-
3. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	372.011.192,-
4. Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	3.909.010.650,-
APBD	530.219.025,-
DAK	3.378.791.625,-
<b>Program Pendukung</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	663.944.580,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	287.000.000,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.625.000,-
4. Program Peningkatan Sumber Daya aparatur	9.000.000,-
5. Program Pengembangan Sistem pelaporan kinerja dan keuangan	29.46.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>5.892.770.420,-</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2018.**

Capaian kinerja organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 adalah capaian kinerja diperoleh dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meliputi bidang :

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan
2. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang dan secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat performance masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara keseluruhan. Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah atau akuntabilitas kinerja ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Pendekatan terhadap indikator kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada pengukuran kinerja yang dilakukan adalah melakukan pengukuran pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU). Sedangkan untuk menilai capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan secara relative (%) realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

#### **1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018**

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018, dapat digambarkan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pembangunan yang responsive gender	Indek Pembangunan Gender(IPG)	84,81	85,44	84,81
2.	MeninMeningkatnya kualitas keluarga dan penanganan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	6	16	40
3.	Meningkatnya peran serta dan pemberdayaan perempuan bidang politik,hukum,dan ekonomi	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	60,97	60,93	60,93
		Persentase keterlibatan perempuan di lembaga legislatif	30	14,28	47,28
4.	Meningkatnya Implementasi Kabupaten Layak Anak dan kualitas perlindungan anak	Status capaian Kabupaten Layak Anak	Skor 300	Skor 200	66,66
		Rasio kekerasan terhadap anak	6%	2,65	44,13
5.	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk dan keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,29	2,10	91,70
		Angka kelahiran total(Total Fertility Rate/TFR) per WUS(15-49 tahun)	2,59	2,85	110,03
		Persentase pemakaian kontrasepsi (Contraception Prevalence Rate(CPR)	78,01	82,00	105,11
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi(unmet need)	27,05	11,43	42,25
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi(unmet need)	81,00	74,00	91,35
		Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun(ASFR 15-19)	19,85	8,35	42,06
		Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-19 tahun)			
6.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur	100	100	100
7.	Meningkatnya disiplin, kapasitas sumber daya aparatur dan sistem pelaporan kinerja dan keuangan.	Persentase peningkatan disiplin kapasitas sumber daya aparatur dan sistem manajemen pelaporan kinerja dan keuangan	100	100	100

Dari pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut diatas dapat dijelaskan untuk Indikator Indek Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2018 target 84,81 dan realisasi 85,44, bahwa IPG Kabupaten Tanjung Jabung Barat Data terakhir BPS Tahun 2017 adalah 85,44 artinya meningkat sebesar 0,74%

dari target Tahun 2018. Kemudian Indikator Indek Pemberdayaan Gender (IDG) target 2018 sebesar 60,97, IDG Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun data terakhir BPS Tahun 2017 adalah 61,93 artinya meningkat sebesar 1,57% dari target Tahun 2018. IPG merupakan alat ukur untuk mengetahui capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan atau menggambarkan kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat diukur dari 4(empat) komponen yaitu angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per-kapita disesuaikan. Sedangkan IDG merupakan alat ukur untuk melihat sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG dapat diukur dari keterlibatan perempuan di Parlemen, perempuan yang berkecimpung dalam pekerjaan manajerial, administrasi dan teknis dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Realisasi indikator status capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat target Tahun 2018 adalah Skor 300 dan realisasi baru mencapai Skor 200 atau tingkat capaiannya 66,7%. Hal ini karena belum semua indikator Kabupaten Layak Anak belum terpenuhi.

Indikator penurunan rasio kekerasan terhadap perempuan target Tahun 2018 sebesar 6% terealisasi 16% yaitu rasio kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan 5 angka dari angka 30(data base tahun 2016) menjadi angka 25 tahun 2018. Sedangkan Rasio kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat target Tahun 2018 adalah 6 dan realisasi 2,65 dengan tingkat capaian 44,13 %. Masih rendahnya laporan kasus kekerasan terhadap anak disebabkan budaya kearifan lokal seperti korban membuat pengaduan ke pihak yang berwenang yaitu P2TP2A/UPPA Polres, karena dianggap aib keluarga dan belum semua masyarakat tersosialisasi tentang Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Capaian LPP (laju Pertumbuhan Penduduk) sebesar 2,10% dari target 2,29%, bahwasanya hanya dapat ditekan sebesar 0,19%. Capaian ini masih dipengaruhi peningkatan jumlah kelahiran sebesar 6.693 jiwa(12,27%). Untuk TFR capaiannya keluar sebesar 10,2,85% sedangkan target 2,59. Angka ini menunjukkan capaian yang cukup tinggi, dimana rata-rata jumlah anak yang dimiliki seorang wanita usia subur umur 15-49 tahun sampai akhir masa reproduksinya punya 3-4 anak, lebih tinggi dari TFR Provinsi yaitu 2,3(SDKI). Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang (PTS) sebaiknya TFR berada diangka 2,0, artinya rata-rata per wanita (15-49) punya 2 anak. Tingginya capaian TFR ini sangat dipengaruhi dari jumlah kesertaan ber-KB. Dari 60.051 PUS yang menggunakan Metode Kontrasepsi MKJP masih relatif tinggi yaitu sebesar 37.764 (62,88%) yaitu terdiri dari Kondom 2.493(0,0%), Suntik 17.852

(3,60%) dan Pil 17.419 (30,05%). Hal ini akan berimplikasi terhadap jumlah kelahiran, drop out dan gagal pakai mempunyai peluang dan kemungkinan.

Angka pemakaian Kontrasepsi (CPR) yang ditargetkan sebesar 78,01% dari 6,051 Pasangan Usia Subur(PUS) tercapai CPR (CU/PUS) sebesar 49.056 (82,00%). Untuk tingkat capaian Permintaan Peserta Masyarakat (PPM) peserta KB Aktif sebesar 107% sedangkan capaian Peserta KB Baru sebesar 76%. Dilihat dari capaian CPR terjadi peningkatan walaupun belum signifikan yaitu hanya sebesar 3,99%, kemudian dapat dilihat Pe-Mix Kontrasepsi yang digunakan yaitu metode Kontrasepsi modern (mCPR) jangka Panjang (MKJP) hanya 11,292 (18,80%) terdiri dari IUD sebanyak 2990(0,78%), MOW sebesar 336 (0,42%), MOP sebesar 113 (0,22%), Implant 7853(5,87%), selebihnya Non MKJP sebesar 37.764(62,88%) terdiri dari Kondom 2.493 (0,0%), Suntik 17.852 (3,60%) dan Pil 17.419 (30,05%). Non MKJP sebesar 37.764 (62,88%). Kemudian Capaian persentase kebutuhan ber-KB yang tidak diinginkan (Unmet Need) sebanyak 11,43% dari target 27,05%, terjadi kebutuhan ber-KB sebesar 2,69% dari cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB.

Capaian angka kelahiran pada Remaja (ASFR) usia 15-19 tahun adalah 74 per 1000 perempuan pada kelompok usia 15-19 tahun dari target 81. Dan persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS(Wanita Usia Subur) 15-49 tahun capaian 8,35% dari target 19,85%.

Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur, menunjukkan pencapaian kinerja yang merupakan pelayanan publik pada lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berhubungan dengan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur tugas-tugas teknis lainnya dapat tercapai 100%, sesuai dengan target yang direncanakan. Demikian dengan Persentase peningkatan disiplin kapasitas sumber daya aparatur dan sistem manajemen pelaporan kinerja dan keuangan pada prinsipnya sudah dapat dilakukan dengan baik dengan realisasi target 100%, walaupun masih ada kelemahan-kelemahan akan tetapi dapat ditindak lanjuti.

## **2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017**

Perbandingan data capaian kinerja antara realisasi tahun 2018 dengan tahun sebelumnya diukur berdasarkan capaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama(IKU). Hasil perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi	
				Tahun 2018	Tahun 2017
	Meningkatnya pembangunan yang responsive gender	Indek Pembangunan Gender(IPG)	84,81	85,44	85,44
	Meningkatkan kualitas keluarga dan penanganan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	6	16	40
	Meningkatnya peran dan serta dan pemberdayaan perempuan bidang politik,hukum,dan ekonomi	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	60,97	61,93	61,93
	Meningkatnya Implementasi Kabupaten Layak Anak dan kualitas perlindungan anak	Persentase keterlibatan perempuan di lembaga legislatif	30	14,28	14,28
	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk dan keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia	Status capaian Kabupaten Layak Anak	Skor 300	Skor 200	Skor 11
		Rasio kekerasan terhadap anak	6%	2,65	2,28
		Laju Pertumbuhan Penduduk	2,29	2,10	2,10
		Angka kelahiran total(Total Fertility Rate/TFR) per WUS(15-49 tahun)	2,59	2,85	2,59
		Persentase pemakaian kontrasepsi (Contraception Prevalence Rate(CPR)	78,01	82,00	73
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi(unmet need)	27,05	11,43	27,05
		Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun(ASFR 15-19)	81,00	74,00	81,00
		Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-19 tahun)	19,85	8,35	19,85
	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur	100	100	100
	Meningkatnya disiplin, kapasitas sumber daya aparatur dan sistem pelaporan kinerja dan ke	Persentase peningkatan disiplin kapasitas sumber daya aparatur dan sistem menejemen pelaporan kinerja dan keuangan	100	100	100

Perbandingan capaian kinerja pada indikator kinerja antara realisasi tahun 2018 dengan realisasi tahun sebelumnya (Tahun 2017) dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa IPG Tahun 2018 realisasinya sebesar 85,44 artinya realisasi Tahun 2018 adalah sebesar IPG Tahun 2017, lebih tinggi dari target

Tahun 2018. Demikian dengan Indikator IDG Kabupaten Tanjung Jabung Barat target 2018 sebesar 60,97 dan realisasi capaian Tahun 2018 sebesar 61,93 artinya realisasi Tahun 2018 adalah IDG Tahun 2017 dan lebih tinggi dari target IDG Tahun 2018 sebesar 60,93. Jadi IPG Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 sebesar 85,44 dan IDG sebesar 61,93. ( Data BPS Tahun 2017)

Indikator menurunkan Rasio kekerasan terhadap perempuan adalah jumlah perempuan korban kekerasan dibagi jumlah penduduk perempuan dalam periode 1(satu) tahun per 100.000 perempuan. Untuk melihat penurunan rasio kekerasan terhadap perempuan, berikut jumlah kasus kekerasan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2015 s.d 2018 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.3  
Jumlah Kasus Kekerasan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Tahun 2015 s.d 2018

NO.	JENIS KASUS	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1.	KDRT	12	23	14	9
2.	SEKSUAL	19	7	11	15
3.	FISIK/PENGANIAYAAN	6	2	11	7
4.	PSIKIS	0	0	0	2
5.	LAINNYA	0	2	2	2
	JUMLAH	37	34	38	35

Sumber Data : Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjab Barat.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2015 s.d 2017 yaitu dari 37 kasus di Tahun 2015, dan menurun di Tahun 2016 menjadi 34 kasus dan kembali meningkat di Tahun 2017 menjadi 38 kasus dan menurun pada Tahun 2018 menjadi 35 kasus. Walaupun jumlah kasus menurun Tahun 2018 akan tetapi jumlah korban kekerasan terhadap perempuan tersebut meningkat dari Tahun 2017 sebanyak 20 orang menjadi 41 orang Tahun 2018. Dari 41 orang perempuan yang mengalami kekerasan sebanyak 30 orang perempuan mengalami kekerasan seksual. Korban kekerasan terhadap perempuan inilah yang dilakukan pendampingan dalam hal penanganan kasus oleh Tim P2TP2A yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai ke jalur hukum.

Sedangkan untuk mengukur indikator Rasio kekerasan terhadap anak dengan target 6 Tahun 2018, realisasi 2,65 atau tingkat capaian 44,13% diperoleh dari jumlah anak korban kekerasan / jumlah seluruh anak x 10.000 (29 anak/109.514 x 10.000). Rasio kekerasan terhadap anak ini dapat dilihat dari jumlah kasus dan korban kekerasan terhadap anak dari Tahun 2015 s.d Tahun 2018 sebagaimana pada Tabel 3.4 dan 3.5 di bawah ini :

Tabel : 3.4  
 Korban Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kelamin  
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2015 s.d 2018

NO.	TAHUN	KORBAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	2015	2	32	34
2.	2016	5	20	25
3.	2017	8	18	26
4.	2018	8	24	32

Sumber : Bidang Perlindungan Anak Dinas P3AP2KB Kab. Tanjung Barat.

Tabel :3.5  
 Jenis Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kelamin  
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2018

No.	Jenis Kekerasan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Penelantaran Anak	1	-	1
2.	Seksual	-	21	23
3.	Fisik	6		7
4.	Psikis	-	1	1
	Jumlah	8	22	32

Sumber : Bidang Perlindungan Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Barat.

Dari tabel diatas jumlah korban kekerasan terhadap anak dari tahun 2015 s.d 2018 juga berpluktuasi yaitu tahun 2015 jumlah korban kekerasan 34 korban terdiri anak laki-laki 2 korban dan anak perempuan 32 korban, menurun menjadi 25 korban tahun 2016 terdiri anak laki-laki 5 korban dan anak perempuan 20 korban, tetapi 2 tahun terakhir meningkat yaitu tahun 2017 berjumlah 26 korban terdiri anak laki-laki 8 korban dan anak perempuan 18 korban serta tahun 2018 berjumlah 34 korban terdiri anak laki-laki 6 korban dan anak perempuan 28 korban. Dari jumlah anak korban kekerasan tersebut kasus yang paling banyak adalah kasus seksual dan korbannya adalah anak perempuan berjumlah 21 korban. dan psikis 1 (satu) korban.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak, maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang pada saat ini baru mencapai Skor 200 dari target 300 Tahun 2018 atau tingkat capaian 66,7%, dibanding dengan Tahun 2017 baru Skor 11. bahwasanya belum tercapainya target skor 300 dikarenakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat baru melaksanakan Rakor Gugus Tugas dan penandatanganan komitmen bersama mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Layak Anak pada tanggal 20 Desember 2018, sehingga pelaksanaan komitmen dan koordinasi GugusTugas KLA belum berjalan dengan maksimal dan belum semua Indikator Kabupaten Layak Anak, seperti Kelembagaan, Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster IV:

Pendidikan, waktu Luang dan Kegiatan Budaya, Klaster V : Perlindungan Khusus yang terpenuhi. Sehingga Tahun 2019 ini diharapkan adanya komitmen dari pemangku kepentingan untuk mewujudkan KLA, koordinasi dan pemahaman tentang KLA antar instansi terkait lebih meningkat melalui Rapat Gugus Tugas KLA dan melaksanakan evaluasi KLA.

Dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana perkembangan sektor Keluarga Berencana Tahun 2017 dan 2018, dapat disampaikan gambaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6  
Perkembangan Sektor Keluarga Berencana Tahun 2017 s.d 2018

No.	Uraian	Tahun		Pertumbuhan Per Tahun(%)
		2017	2018	
1.	Rasio Akseptor KB	84	92	8
2.	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR	73	82	9
3.	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi(Unmet-Need)	17,00	17,43	0,43
4.	KB Aktif Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)	20,11	21,17	1,06
5	Persentase Tingkat Ketidakberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	17,74	17,41	0,33
6.	Jumlah Peserta KB Aktif	44.741	49.056	4.315
7.	Jumlah Peserta KB Aktif Tambahan (Peserta KB Baru)	6.176	6.501	325

Sumber : Bidang Dalduk Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjab Barat

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan sektor keluarga berencana rata-rata cukup baik dan mengalami pertumbuhan, tetapi perkembangannya belum signifikan, Hal ini dapat disampaikan gambaran sebagai berikut :

- a. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) bukan peserta KB berdasarkan alasan tidak ber KB (sedang hamil, alasan fertilitas, tidak menyetujui KB, tidak tau tentang KB, takut efek samping, pelayanan KB jauh, tidak mampu/mahal, dan lainnya) masih tinggi yaitu sebesar 19.650 atau 36,85% dari jumlah PUS.
- b. Kesertaan ber KB PUS keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I masih banyak yang menggunakan Metode Kontrasepsi Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yaitu Suntik dan Pil.
- c. Angka putus pakai (droup out) dan unmetneed masih cukup tinggi.
- d. Adanya penurunan capaian Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) Peserta KB Baru dari Tahun 2017 (84%) ke Tahun 2018 (76%) yaitu sebesar 8%.

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan akhir Renstra.

Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2018 dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang ada dalam dokumen RenstraDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang disinkronisasikan dengan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.6  
Perbandingan Capaian Kinerja s/d Renstra dengan Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Ta.2018	Tkt.Kemajuan(%)
1.	Meningkatnya pembangunan yang responsive gender	Indek Pembangunan Gender(	87,00	85,44	98,20
2.	Meningkatnya kualitas keluarga dan penanganan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	9	16	37,5
	Meningkatnya peran serta dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, dan ekonomi	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	61,03	61,93	101,47
		Persentase keterlibatan perempuan di lembaga legislatif	30	14,28	47,6
3.	Meningkatnya Implementasi Kabupaten Layak Anak dan kualitas perlindungan anak	Status capaian Kabupaten Layak Anak	Skor 900	Skor 200	22,22
		Rasio kekerasan terhadap anak	3	2,65	88,33
4.	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk dan keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,93	2,10	8,80
		Angka kelahiran total(Total Fertility Rate/TFR) per WUS(15-49 tahun)	2,58	2,85	(10,8)
		Persentase pemakaian kontrasepsi (Contraception Prevalence Rate(CPR)	80,16	82,00	102,29
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi(unmet need)	27,05	11,43	42,25
		Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun(ASFR 15-19)	79,00	74,00	93,67
		Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-19 tahun)	16,40	8,35	50,91

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan dan Solusi**

Tingkat keberhasilan yang menjadi pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2018, dapat disampaikan yaitu jika dilihat dari alokasi anggaran yang ditetapkan pada masing-masing 9(sembilan) program yang ditetapkan Tahun Anggaran 2018, bahwasanya pelaksanaan program yang bersumber dari APBD Tahun 2018, realisasi keuangan capaiannya secara keseluruhan mencapai 84,76% dan fisik 98,39% atau di atas 80%. Kemudian pelaksanaan masing-masing program juga capaiannya di atas 80% bahkan ada yang 100%. Karena pencapaian pelaksanaan program ini adalah merupakan keberhasilan yang menjadi kinerja dari pada OPD, maka penyebab keberhasilan dimaksud adalah karena:

- a. Adanya komitmen dari pimpinan bersama dengan aparaturnya untuk bersama-sama melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku baik aturan teknis maupun keuangan,
- b. Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik baik interen maupun eksteren dalam pengambil keputusan serta dengan instansi terkait sebagai mitra kerja.
- c. Meningkatkan pembinaan kepada petugas lapangan dalam memberikan pelayanan dibidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dan pengendalian penduduk serta keluarga berencana.

Adapun permasalahan/ kegagalan yang dihadapi yaitu :

- a. Untuk pelaksanaan kegiatan pada masing-masing program anggaran APBD Tahun 2018 pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih minim, sehingga pencapaian target kegiatan kurang maksimal, terutama pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sedangkan untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana masih didukung dengan alokasi DAK Tahun 2018.
- b. Meningkatnya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang merupakan kelompok rentan tindak kekerasan.
- c. Belum semua masyarakat mengetahui dan memahami Undang-Undang dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- d. Kurangnya perlindungan dan pemenuhan hak anak
- e. Anggaran untuk program dalam urusan wajib pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih minim
- f. Dalam hal perkembangan sektor Keluarga Berencana ini ada beberapa masalah yang menyebabkan adanya penurunan peserta KB Aktif dan

Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yaitu:

- a. Peserta KB Aktif ada yang ingin segera memiliki anak atau ingin hamil.
- b. Peserta KB ada yang tidak cocok dengan salah satu alat, obat Kontrasepsi, karena memiliki penyakit hipertensi dan lainnya.
- c. Adanya penurunan Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) yaitu target Peserta KB Aktif dari tahun 2017 ke tahun 2018.
- d. Masih terbatasnya tenaga lini lapangan (PKB/PLKB/Motivator).
- e. Masihrendahnya pemahaman kader/ masyarakat/ keluarga/ Pasangan Usia Subur (PUS)/ Wanita Usia Subur (WUS) tentang tujuan dan manfaat program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

**Solusi :**

1. Diharapkan kedepannya ada penambahan anggaran sehingga kegiatan-kegiatan dapat ditingkatkan dan kegiatan lain yang ada pada Renstra dapat dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan
2. Perlu ditingkatkan pelaksanaan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap Kecamatan, Kelurahan dan Desa Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Adanya komitmen dari masyarakat, pemerintah dan stakeholder untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian tentang kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak melalui penyusunan regulasi/kebijakan dan program serta pelaksanaan kegiatan yang responsive gender, pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi Kabupaten Layak Anak.
5. Perlu peningkatan anggaran program dan kegiatan untuk program dalam urusan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak
6. Menambah Penyuluh/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) atau motivator Keluarga Berencana sehingga kedepannya petugas keluarga berencana semakin kuat sekaligus mampu mensukseskan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

7. Peningkatan Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) dengan menghitung secara tepat sasaran target Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum pernah ber-KB ataupun putus pakai per wilayah kecamatan/desa.
8. Meningkatkan intensitas sosialisasi, advokasi dan penggerakan terutama tentang pentingnya program Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur (PUS).

## **5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik tentunya harus didukung dengan Sumber Daya Aparatur dan anggaran yang tersedia, untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan dari pada aparatur) serta belanja Langsung (pelaksanaan pembangunan/program dan kegiatan) . Adapun belanja langsung dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan alokasi anggaran setiap tahunnya.

- a. Alokasi Anggaran per sasaran strategis dan indikator kinerja :

Adapun rincian penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Baratdiperbandingkan dengan total jumlah anggaran belanja langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat digambarkan pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6  
Alokasi Anggaran Per - Sasaran Strategis Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Proporsi (%)
1.	Meningkatnya pembangunan yang responsive gender	Indek Pembangunan Gender(IPG)	138.492.048	2,35
2.	Meningkatnya kualitas keluarga dan penanganan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)		
3.	Meningkatnya peran serta dan pemberdayaan perempuan bidang politik,hukum,dan ekonomi	Indek Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase keterlibatan perempuan di lembaga legislatif	463.222.950	7,86
4.	Meningkatnya Implementasi Kabupaten Layak Anak dan kualitas perlindungan anak	Status capaian Kabupaten Layak Anak Rasio kekerasan terhadap anak	372.011.192	6,31
5.	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk dan keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia	Laju Pertumbuhan Penduduk Angka kelahiran total(Total Fertility Rate/TFR) per WUS(15-49 tahun) Persentase pemakaian kontrasepsi (Contraception Prevalence Rate(CPR)) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi(unmet need) Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun(ASFR 15-19) Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-19 tahun)	3.909.010.650	66,33
6.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur	950.944.580	16,13
7.	Meningkatnya disiplin, kapasitas sumber daya aparatur dan sistem pelaporan kinerja dan keuangan.	Persentase peningkatan disiplin kapasitas sumber daya aparatur dan sistem manajemen pelaporan kinerja dan keuangan	59.089.000	1,00
	Jumlah		5.892.770.420	

b. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari pencapaian realisasi anggaran dan realisasi kinerja, nilai efisiensi dari setiap indikator dapat disajikan sebagai tabel berikut :

Tabel 3.7  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran(Rp)	Tkt.Efisiensi Anggaran (%)
1.	Meningkatnya pembangunan yang responsive gender	Indek Pembangunan Gender(IPG)	85,44	124.947.048	9,78
		Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	16		
2.	Meningkatnya kualitas keluarga dan penanganan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	60,93	439.706.950	5,07
		Persentase keterlibatan perempuan di lembaga legislatif	14,28		
4.	Meningkatnya Implementasi Kabupaten Layak Anak dan kualitas perlindungan anak	Status capaian Kabupaten Layak Anak	Skor 200	360.950.550	2,97
		Rasio kekerasan terhadap anak	2,65		
5.	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk dan keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,10	3.123.009.593	20,10
		Angka kelahiran total(Total Fertility Rate/TFR) per WUS(15-49 tahun)	2,85		
		Persentase pemakaian kontrasepsi (Contraception Prevalence Rate(CPR)	82,00		
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi(unmet need)	11,43		
		Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun(ASFR 15-19 tahun)	74,00		
		Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-19 tahun)	8,35		
6.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur	100	886.740.200	6,75
7.	Meningkatnya disiplin, kapasitas sumber daya aparatur dan sistem pelaporan kinerja dan keuangan.	Persentase peningkatan disiplin kapasitas sumber daya aparatur dan sistem menejemen pelaporan kinerja dan keuangan	100	59.089.000	0,00

Untuk pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 program dan kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan adalah :

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, jumlah anggaran APBD sebesar Rp. 138.492.048,- realisasi keuangan sebesar Rp. 124.947.048,- atau 90,22% dan fisik 100%. Dalam melaksanakan program ini kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pelatihan bagi SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT dan fasilitasi pengembangan P2TP2A, Target kinerja out put (Jumlah peserta pelatihan 30 orang) dengan anggaran kegiatan sebesar Rp. 110.101.000,- realisasi sebesar Rp. 96.556.000,- tingkat capaian realisasi keuangan 87,70% dan fisik 100%.

Untuk pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, dengan jumlah anggaran APBD sebesar Rp. 530.219.025,- realisasi sebesar Rp. 515.869.025,- tingkat capaian realisasi keuangan 97,29% dan fisik 100% dari target 100%. Dalam melaksanakan program ini kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan pelayanan dan pembinaan keluarga berencana dengan anggaran kegiatan sebesar Rp. 50.665.000,- realisasi sebesar Rp. 50.665.000,- atau keuangan 100 dan fisik 100%.
- b. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB, dengan anggaran kegiatan sebesar Rp. 252.315.360,- realisasi Rp. 238.015.793,- atau keuangan 91,00% dan fisik 100%
- c. Pertemuan program keluarga berencana dan pelayanan KB bagi keluarga miskin, dengan anggaran sebesar Rp. 61.985.900,- realisasi sebesar Rp. 61.985.900,- atau keuangan 100% dan fisik 100%.
- d. Sosialisasi pendidikan kependudukan melalui jalur formal sekolah siga kependudukan, dengan anggaran sebesar Rp. 48.821.750,- realisasi sebesar Rp. 48.821.750,- atau keuangan 100% dan fisik 100%.
- e. Pertemuan Kader kelompok Bina Keluarga di Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 69.481.015,- realisasi sebesar Rp. 69.481.015,- atau keuangan 100% dan fisik 100%.
- f. Orientasi pendidikan kependudukan bagi kader di Kampung KB, dengan anggaran sebesar Rp. 46.950.000,- realisasi sebesar Rp. 46.900.000,- atau keuangan 100% dan fisik 100%.

Tabel 4.  
Anggaran DAK yang dikelola Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjab Barat Tahun 2018

No.	Kegiatan	Anggaran		Persentase Capaian Realisasi
		Jumlah	Realisasi	
1.	<b>FISIK</b> Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan penyuluhan KB	496.050.000	444.978.213	89,70
2.	Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dan penyuluhan KB	362.950.000	355.343.600	97,90
	Jumlah	859.000.000	800321.813	93,16
3.	<b>BOKB</b> Dukungan Media KIE dan Menejemen BOKB	385.869.774	338.157.279	87,64
4.	Operasional Integritas progam KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB	1.050.920.780	435.680.000	41,46
5.	Operasional KIE oleh PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu	804.000.000	804.000.000	100,00
6.	Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	129.000.000	109.994.000	85,27
7.	Operasional Balai Penyuluhan KB	150.001.071	118.987.476	79,32
	Jumlah	2.519.791.625	1.806.818.735	71,70
	Jumlah	3.378.791.625	2.607.140.568	77,16

Alokasi DAK KB adalah dukungan sarana prasarana untuk Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Peruntukan DAK Tahun 2018 sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.378.791.625,- terealisasi sebesar Rp. 2.607.140.568,- tingkat capaian keuangan 77,16%. Fisik 92,00 %.

Adapun capaian realisasi keuangan DAK KB tidak mencapai 100% disebabkan sisa pagu dan unit cost yang ditetapkan berdasarkan Juknis lebih besar dari petunjuk Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun secara pengeluaran adalah penghematan,

#### B. Realisasi Anggaran Tahun 2018.

Berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana yang diperjanjikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah, didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Dukungan anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 5.892.770.420,- yang terdiri dari APBD sebesar Rp. 2.513.978.795,- dan DAK sebesar Rp. 3.378.791.625,- Kemudian anggaran yang ditetapkan tersebut adalah merupakan Belanja Langsung Pembangunan sedangkan Belanja Tidak langsung adalah merupakan belanja Pegawai yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2018.

Adapun anggaran pembiayaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**Rincian Belanja Langsung dan Realisasi Tahun 2018**

<b>NO.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Pagu(Rp.)</b>	<b>Realisasi(Rp.)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>381.688.580</b>	<b>317.473.871</b>	<b>83,18</b>
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.350.000	1.350.000	100,00
1.2	Penyediaan Jasa Komunikai, Sumber Daya Air dan Listrik	55.200.000	41.788.181	75,70
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	91.630.000	91.630.000	100,00
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	11.112.250	11.112.250	100,00
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.864.450	40.864.450	100,00
1.6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.459.280	14.459.280	100,00
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	9.243.600	6.243.600	100,00
1.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000	3.600.000	100,00
1.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	4.200.000	4.200.000	100,00
1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	430.335.000	429.917.939	84,22
1.11	Penyediaan Iklan Layanan	1.950.000	1.350.000	41,67
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.224.537.500</b>	<b>1.193.397.400</b>	<b>97,46</b>
2.1	Pengadaan Peralatan gedung kantor	51.850.000	51.271.000	98,88
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	35.000.00	10.000.000	28,57
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	192.150.000	167.953.500	86,90
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8.000.000	8.000.000	100,00
2.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana pelayanan dan penyuluhan KB (DAK)	496.050.000	444.978.213	89,70
2.6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Penyuluhan KB (DAK)	362.950.000	355.343.600	97,90
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>20.625.000</b>	<b>20.625.000</b>	<b>100,00</b>
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	20.625.000	20.625.000	100,00
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100,00</b>
	Bimbingan Teknis	9.000.000	9.000.000	100,00
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan kinerja dan keuangan</b>	<b>29.464.000</b>	<b>29.464.000</b>	<b>96,75</b>
5.1	Penyusunan Laporan capaian kinerja ikhtisar kinerja dan keuangan	29.464.000	29.464.000	96,75

<b>6</b>	<b>Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan</b>	476.696.000	411.432.990	86,31
<b>6.1</b>	Pelatihan bagi SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT dan fasilitasi pengembangan P2TP2A	110.101.000	96.556.000	87,70
<b>6.2</b>	Sosialisasi dan advokasi kebijakan PUG dan bimbingan manajemen usaha ekonomi keluarga	28.391.048	28.391.048	100,00
<b>6.3</b>	<b>Program peningkatan Peran Serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</b>	<b>463.222.950</b>	<b>439.706.950</b>	<b>94,92</b>
<b>6.4</b>	Peningkatan kapasitas DWP Kabupaten Tanjung Jabung Barat	209.100.000	203.665.000	97,40
	Peningkatan kapasitas GOW Kabupaten Tanjung Jabung Barat	200.200.000	191.099.000	95,45
	Penguatan Pengarusutamaan Gender dan data terpilah	53.922.950	44.942.950	83,35
<b>7</b>	<b>Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak</b>	<b>372.011.192</b>	<b>360.950.550</b>	<b>97,03</b>
7.1	Pembinaan dan pengembangan Tumbuh Kembang anak	127.915.000	120.552.000	94,24
7.2	Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak(GN-AKSA)	42.755.000	42.755.000	100,00
7.3	Pertemuan Forum Anak Daerah Sosialisasi pengembangan	79.765.000	78.845.000	98,85
7.4	Puskesmas Ramah Anak	22.530.000	20.735.000	92,03
7.5	Sosialisasi Peraturan Daerah tentang perlindungan perempuan dan anak	99.046.192	98.063.550	91,01
<b>8</b>	<b>Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</b>	<b>3.050.010.650</b>	<b>2.322.687.780</b>	<b>76,15</b>
8.1	Peningkatan pelayanan dan pembinaan Keluarga Berencana	50.665.000	50.665.000	100,00
8.2	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	252.315.360	238.015.360	94,33
8.3	Pertemuan program keluarga berencana dan pelayanan KB bagi keluarga miskin	61.985.900	61.985.900	100,00
8.4	Pertemuan kader kelompok bina keluarga di Kecamatan	69.481.015	69.481.015	100,00
8.5	Orientasi pendidikan kependudukan bagi kader di Kampung KB	46.950.000	46.900.000	99,89
8.6	Sosialisasi pendidikan kependudukan melalui jalur formal sekolah siaga kependudukan	48.821.750	48.821.750	100,00
	Dukungan media KIE dan manajemen BOKB(DAK)	385.869.774	338.157.279	87,64
	Oper	65.687.000		
	<b>Jumlah</b>	<b>3.015.401.830</b>	<b>2.734.588.614</b>	<b>90,69</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 adalah merupakan dokumen laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati, kemudian menyampaikannya kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, kebijakan serta wewenang yang dimiliki.

Wujud pertanggung jawaban dimaksud berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan hak Anak, bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan serta bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dilakukan dengan program yang dijabarkan dalam kegiatan, kemudian diukur tingkat pencapaian kinerja melalui indikator yang telah ditetapkan, maka keseluruhan proses tersebut dituangkan dalam suatu bentuk Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang dilaksanakan setiap tahun.

Dengan mengacu pada empat sasaran strategis dengan target indikator kinerja, maka dapat diketahui bahwa hasil kinerja Tahun 2018 secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan mencapai di atas 80%. Hal ini dapat dilihat dari persentase pencapaian yang menjelaskan bahwa posisi kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2018 dapat dikatakan telah memenuhi kategori cukup baik.

Demikian laporan kinerja ini dibuat berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan sangat disadari dalam penyusunannya belum sempurna, sehubungan dengan itu diharapkan adanya masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan laporan ini, dalam upaya perbaikan untuk masa yang akan datang, dan laporan kinerja ini semoga bermanfaat dan dapat lebih meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan program pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal,      Februari 2019

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



**Drs. H. AHMAD PALLOGE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600305 198503 1 013